Pengaruh Tingkat Kepemilikan Pemerintah, Dewan Komisaris Independen Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan Anti Korupsi

Fauzan Rizki Yuliantama¹, Meihendri²

^{1,2}Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Bung Hatta

fauzanrizkiy@outlook.com¹

meihendri@bunghatta.ac.id²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh kepemilikan pemerintah, dewan komisaris independen, dan ukuran perusahaan terhadap pengungkapan anti korupsi pada perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampel penelitian ini terdiri dari 26 perusahaan BUMN dengan periode pengamatan 2019–2024, yang dipilih menggunakan metode purposive sampling berdasarkan kriteria tertentu. Variabel dependen diukur melalui analisis konten laporan tahunan dan/atau laporan keberlanjutan, sedangkan analisis data menggunakan perangkat lunak SPSS 27 dengan metode regresi linear berganda pada tingkat signifikansi 5%. Hasil penelitian menunjukkan kepemilikan pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan anti korupsi. Sebaliknya, dewan komisaris independen dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan anti korupsi. Temuan ini menegaskan bahwa mekanisme tata kelola dan ukuran perusahaan berperan penting dalam mendorong transparansi perusahaan BUMN.

Kata Kunci: kepemilikan pemerintah; dewan komisaris independen; ukuran perusahaan, pengungkapan anti korupsi; BUMN.

ABSTRACT

His study aims to analyze the effect of government ownership, independent commissioners, and firm size on anti-corruption disclosure in State-Owned Enterprises (BUMN) listed on the Indonesia Stock Exchange. The research sample consists of 26 soes observed during the 2019–2024 period, selected using purposive sampling based on specific criteria. The dependent variable was measured through content analysis of annual reports and/or sustainability reports, while data analysis was conducted using SPSS 27 software with multiple linear regression at a 5% significance level. The results show that government ownership has no significant effect on anti-corruption disclosure. In contrast, independent commissioners and firm size have a significant effect on anti-corruption disclosure. These findings emphasize that corporate governance mechanisms and firm size play an important role in enhancing transparency within BUMN.

Keyword: government ownership; independent commissioners; firm size; anti-corruption disclosure; BUMN.

PENDAHULUAN

Kasus korupsi hingga saat ini masih menjadi isu krusial yang mendapat sorotan serius di berbagai negara, termasuk Indonesia. Wajdi et al. (2024) mendefinisikan korupsi sebagai tindakan yang melibatkan penyalahgunaan wewenang publik atau posisi otoritas untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun kepentingan yang tidak sah. Definisi tersebut menegaskan bahwa korupsi merupakan bentuk dari penggunaan kekuasaan yang seharusnya diarahkan bagi kepentingan publik, namun justru dieksploitasi demi keuntungan individu atau kelompok tertentu. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya menghambat laju pembangunan ekonomi, tetapi juga secara perlahan menggerus tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Tindakan korupsi Indonesia berdasarkan informasi yang diperoleh dari website *Transparency International* pada tahun 2024 Indonesia memperoleh skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) sebesar 37 dan menduduki peringkat 99 dari 180 negara, Skor tersebut menempatkan Indonesia dalam kategori negara dengan tingkat korupsi yang tinggi. Skor ini juga masih berada di bawah rata-rata global, yaitu 43, yang menunjukkan bahwa persepsi terhadap integritas pemberantasan korupsi di Indonesia masih tergolong rendah. Kasus korupsi pada Indonesia tidak terjadi hanya pada perusahaan swasta namun juga terjadi pada perusahaan BUMN.

Pada Februari 2025, salah satu kasus besar terjadi di PT Pertamina Patra Niaga dengan estimasi kerugian negara mencapai Rp193,7 triliun, yang melibatkan praktik pengoplosan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite (RON 90) menjadi Pertamax (RON 92) di fasilitas penyimpanan untuk dijual dengan harga lebih tinggi, serta dugaan manipulasi data impor BBM yang menyebabkan kelebihan pembayaran subsidi oleh negara, ditambah penggunaan metode pembayaran spot dalam pembelian minyak mentah yang menimbulkan potensi *mark-up* harga. Pada tahun 2024, kasus besar juga terungkap di PT Timah dengan kerugian negara diperkirakan mencapai Rp300 triliun, di mana sejumlah perusahaan swasta diduga melakukan penambangan timah ilegal di area konsesi dengan dukungan oknum internal, lalu menjual bijih timah melalui perantara kepada PT Timah seolah-olah berasal dari sumber resmi. Selain itu, pada September 2024 di sektor farmasi, PT Indofarma Tbk menghadapi dugaan manipulasi laporan keuangan dan transaksi fiktif yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp370 miliar, di mana audit independen menemukan adanya pencatatan palsu atas transaksi penjualan, piutang, serta pembayaran uang muka pembelian alat kesehatan yang tidak pernah terjadi. Salah satu upaya untuk mencegah praktik korupsi adalah dengan meningkatkan transparansi melalui pengungkapan anti korupsi. Menurut Solomon (2010) pengungkapan kebijakan anti korupsi sebagai bagian dari upaya perusahaan untuk menjaga integritas dan transparansi. Dalam pengertian ini, pengungkapan anti korupsi mengarah pada publikasi informasi mengenai kebijakan anti penyuapan dan langkah-langkah pencegahan yang diambil untuk memastikan bahwa perusahaan beroperasi secara etis dan tidak terlibat dalam praktik korupsi. Hal ini dilakukan untuk menunjukkan tanggung jawab sosial serta kepatuhan terhadap prinsip tata kelola yang baik.

Beberapa *research gap* pada penelitian terdahulu yang menjadi landasan pada penelitian ini. Menurut penelitian Widya Zulfani et al. (2024) dan Faisal et al. (2022) menemukan adanya pengaruh signifikan tingkat kepemilikan pemerintah terhadap pengungkapan anti korupsi, sedangkan penelitian Graciella et al. (2023); Sari et al. (2021) menunjukkan tingkat kepemilikan pemerintah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan anti korupsi. Hal yang sama juga terlihat pada variabel dewan komisaris independen, di mana penelitian Hartomo & Hutomo (2020), Previtali & Cerchiello (2023), serta Rissdiana & Riduwan (2023) menunjukkan adanya pengaruh

ISSN: xxxx-xxxx (media online)

dewan komisaris independen terhadap pengungkapan anti korupsi, namun temuan Graciella et al. (2023), Faisal et al. (2022), dan Indarto (2023) menunjukkan hasil yang berbeda bahwa dewan komisaris independent tidak berpengaruh terhadap pengungkapan anti korupsi. Inkonsistensi juga terjadi pada variabel ukuran perusahaan. Penelitian Masud et al. (2024), Rissdiana & Riduwan (2023), dan Permatasari & Prastiwi (2023) menemukan adanya pengaruh signifikan, sementara penelitian Graciella et al. (2023), Tyas & Rahmawati (2023), dan Ghazwani et al. (2024) menemukan tidak ada pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan anti korupsi.

Faisal et al. (2022) menjelaskan bahwa perusahaan dengan kepemilikan pemerintah cenderung memanfaatkan pengungkapan kebijakan anti korupsi sebagai sarana untuk menunjukkan kepatuhan terhadap prinsip integritas dan tata kelola yang baik, sekaligus menjaga citra positif di hadapan para pemangku kepentingan. Dengan demikian, praktik pengungkapan tersebut tidak hanya bersifat formalitas regulasi, melainkan juga menjadi kebutuhan strategis guna mempertahankan kepercayaan publik. Tingkat kepemilikan pemerintah, khususnya pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), diyakini berperan penting dalam menentukan sejauh mana kebijakan anti korupsi diungkapkan oleh perusahaan, mengingat tingginya tuntutan masyarakat terhadap akuntabilitas dan integritas lembaga yang mengelola sumber daya negara (Jannah & Adhariani, 2021).

Faktor lain yang memengaruhi tingkat pengungkapan kebijakan anti korupsi adalah keberadaan dewan komisaris independen. Dewan komisaris independen merupakan elemen penting dalam struktur tata kelola perusahaan karena memiliki fungsi utama untuk mengawasi kinerja manajemen. Independensi yang dimiliki memungkinkan mereka bertindak secara objektif, bebas dari tekanan internal, serta tidak memiliki keterikatan langsung dengan aktivitas operasional perusahaan (Digdo Hartomo et al., 2019). Temuan Hartomo & Hutomo (2020) menunjukkan bahwa semakin besar proporsi komisaris independen dalam suatu perusahaan, semakin tinggi pula kecenderungan perusahaan untuk mengungkapkan kebijakan anti korupsi. Hal ini sejalan dengan peran komisaris independen yang mendorong manajemen agar menyajikan informasi yang relevan bagi investor, termasuk mengenai kebijakan anti korupsi, sebagai bentuk akuntabilitas publik sekaligus upaya menjaga legitimasi sosial perusahaan.

Faktor selanjutnya adalah ukuran perusahaan, Ukuran perusahaan menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi tingkat pengungkapan kebijakan anti korupsi. Perusahaan dengan ukuran yang lebih besar umumnya memiliki kompleksitas operasional yang lebih tinggi, sumber daya manusia dan finansial yang lebih kuat, serta pengawasan publik yang lebih besar. Faktor-faktor ini mendorong perusahaan besar untuk lebih transparan dalam menyampaikan informasi terkait kebijakan antikorupsi. Menurut Widya Zulfani et al. (2024), perusahaan besar memiliki kecenderungan untuk mengungkapkan kebijakan anti korupsi secara lebih menyeluruh karena mereka memiliki kapasitas pelaporan yang lebih baik, termasuk dalam hal sistem pengendalian internal dan pelaporan keberlanjutan. Selain itu, perusahaan besar cenderung menjadi sorotan publik dan media, sehingga mereka terdorong untuk menjaga citra dan reputasi institusional melalui transparansi.

KAJIAN LITERATUR

Legitimacy Theory

Ghozali & Chariri (2007) menyatakan bahwa teori legitimasi didasarkan pada adanya hubungan sosial antara perusahaan dengan masyarakat di mana perusahaan tersebut beroperasi. Hubungan ini menegaskan bahwa keberlangsungan aktivitas perusahaan sangat dipengaruhi oleh tingkat penerimaan masyarakat, mengingat perusahaan memanfaatkan sumber daya ekonomi

ISSN: xxxx-xxxx (media online)

yang berasal dari lingkungan sekitar. Sejalan dengan hal tersebut, Deegan et al. (2002) menekankan bahwa organisasi perlu secara konsisten memastikan kegiatan operasionalnya selaras dengan nilai, norma, serta ekspektasi sosial yang berlaku. Teori legitimasi menyoroti pentingnya perusahaan dalam menjaga dukungan sosial dengan melakukan tindakan yang sah dan dapat diterima publik. Selanjutnya, Gray et al. (1996) menegaskan bahwa perusahaan cenderung secara sukarela melaporkan aktivitasnya apabila manajemen menilai bahwa informasi tersebut diharapkan masyarakat. Oleh karena itu, pengungkapan tanggung jawab sosial dalam laporan tahunan dipandang sebagai wujud transparansi sekaligus strategi untuk membangun citra positif di mata pemangku kepentingan, termasuk melalui penyampaian kebijakan anti korupsi.

Tingkat Kepemilikan Pemerintah

Menurut Sudana (2011) kepemilikan pemerintah merupakan bentuk kepemilikan di mana saham perusahaan sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh negara, baik melalui penyertaan langsung dari kekayaan negara maupun melalui lembaga perwakilan. Kepemilikan ini memberikan pemerintah hak suara serta kontrol terhadap pengambilan keputusan penting dalam perusahaan, termasuk dalam hal pengangkatan manajemen dan penentuan kebijakan strategis. Menurut Hartomo & Hutomo (2020) perusahaan dengan tingkat kepemilikan pemerintah yang tinggi cenderung beroperasi selaras dengan kepentingan publik, termasuk dalam mencegah dan memberantas praktik korupsi. Selain itu, tekanan eksternal dari masyarakat, media, dan lembaga pengawas juga lebih besar terhadap perusahaan milik negara, sehingga mendorong manajemen untuk lebih transparan, termasuk dalam pengungkapan kebijakan antikorupsi. Pengungkapan ini bukan hanya untuk memenuhi kewajiban regulatif, tetapi juga sebagai strategi membangun kepercayaan publik dan mempertahankan reputasi institusional di tengah tuntutan akan integritas.

H1 : Tingkat Kepemilikan Pemerintah Berpengaruh Terhadap Pengungkapan Anti Korupsi.

Dewan Komisaris Independen

Menurut Alijoyo & Zaini (2012) Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan (tidak memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan), dipilih secara transparan dan independen, memiliki integritas dan kompetensi yang memadai, bebas dari pengaruh yang berhubungan dengan kepentingan pribadi atau pihak lain, serta dapat bertindak secara objektif dan independen dengan berpedoman pada prinsip-prinsip *good corporate governance* (transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran). Dewan komisaris independen merupakan salah satu pilar utama dalam struktur tata kelola perusahaan yang efektif. Dalam konteks pengungkapan kebijakan anti korupsi, dewan komisaris independen berperan penting dalam memastikan bahwa perusahaan tidak hanya mematuhi peraturan perundang-undangan, tetapi juga menunjukkan komitmen etis dalam menjalankan operasionalnya. Penelitian Previtali & Cerchiello (2023) menemukan bahwa perusahaan dengan struktur tata kelola yang kuat, termasuk proporsi komisaris independen yang tinggi, lebih cenderung melakukan pelaporan terkait kebijakan etika dan antikorupsi. Kehadiran dewan komisaris independen berfungsi sebagai mekanisme pengawasan, termasuk mendorong pengungkapan informasi non-keuangan seperti kebijakan anti korupsi.

H2 : Dewan Komisaris Independen Berpengaruh Terhadap Pengungkapan Anti Korupsi.

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merujuk pada suatu indikator yang digunakan untuk menggambarkan besar kecilnya skala operasional suatu entitas bisnis. Ukuran perusahaan merupakan salah satu variabel penting dalam studi-studi akuntansi dan keuangan, yang sering digunakan untuk menjelaskan kecenderungan perusahaan dalam melakukan pengungkapan (Sudana, 2011). Ukuran perusahaan mencerminkan kapasitas sumber daya dan cakupan operasi suatu entitas bisnis. Perusahaan dengan skala yang lebih besar cenderung memiliki sistem pengendalian internal yang lebih kompleks, serta eksposur publik dan media yang lebih tinggi. Oleh karena itu, mereka menghadapi tekanan yang lebih besar dari pemangku kepentingan untuk bertindak transparan dan akuntabel, termasuk dalam mengungkapkan kebijakan anti korupsi (Odriozola & Etxeberria, 2021).

H3 : Ukuran Perusahaan Berpengaruh Terhadap Pengungkapan Anti Korupsi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis data skunder. Data skunder diperoleh dari *annual report* perusahaan. Populasi untuk penelitian ini merupakan perusahaan BUMN yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sampel yang digunakan pada penelitian merupakan perusahaan BUMN yang tercatat di BEI pada rentang waktu 2019-2024. Kriteria *purposive sampling* yang diterapkan merupakan: 1). Perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI untuk tahun 2019-2024 2). Perusahaan BUMN yang menerbitkan annual report untuk periode 31 Desember 2019-2024 secara berturut-turut. Dari kriteria sampelnya, terdapat 26 perusahaan dengan total data observasi sebanyak 156.

Tabel 1 Pengukuran Variabel

Variabel	Pengukuran	Sumber
Pengungkapan Anti Korupsi (PAK)	$PAK = \frac{JUMLAH\ ITEM\ YANG\ DIUNGKAPAN}{TOTAL\ ITEM\ PENGUNGKAPAN\ ACDI}$ <p>Pengungkapan ini diukur menggunakan <i>Anti Corruption Disclosure Index</i> yang berjumlah 40 item pengungkapan, setiap pengungkapan yang terdapat pada <i>annual report</i> akan diberikan skor 1 dan jika tidak ada maka diberikan skor 0.</p>	Karim et al. (2016)
Tingkat Kepemilikan Pemerintah (TKP)	$TKP = \frac{JUMLAH\ SAHAM\ PEMERINTAH}{JUMLAH\ SAHAM\ BEREDAR}$	Widya Zulfani et al. (2024)
Dewan Komisaris Independen (DKI)	$DKI = \frac{JUMLAH\ KOMISARIS\ INDEPENDEN}{JUMLAH\ DEWAN\ KOMISARIS}$	Rissdiana & Riduwan (2023)
Ukuran Perusahaan (UP)	$UP = LN\ TOTAL\ ASSET$	Faisal et al. (2022)

Model Regresi Linier Berganda

$$PAK = \alpha + \beta_1TKP + \beta_2DKI + \beta_3UP + \epsilon \dots\dots (1)$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Statistik Deskriptif

Tabel 2 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minim um	Maxim um	Mean	Std. Deviation
Pengungkapan Anti Korupsi	156	0,20	0,83	0,5934	0,13708
Tingkat Kepemilikan Pemerintah	156	0,51	0,87	0,6493	0,11096
Dewan Komisaris Independen	156	0,29	0,75	0,4954	0,11625
Ukuran perusahaan	156	27,2	35,4	31,459	1,7694
Valid N(listwise)	156				

Tabel 2 menyajikan hasil uji statistik deskriptif terhadap variabel penelitian. Variabel Pengungkapan Anti Korupsi memiliki nilai minimum sebesar 0,20 dan maksimum 0,83 dengan rata-rata 0,5934 serta standar deviasi 0,13708. Variabel Tingkat Kepemilikan Pemerintah menunjukkan nilai minimum 0,51 dan maksimum 0,87 dengan rata-rata 0,6493 serta standar deviasi 0,11096. Selanjutnya, Dewan Komisaris Independen memiliki nilai minimum 0,29 dan maksimum 0,75 dengan rata-rata 0,4954 serta standar deviasi 0,11625. Adapun variabel Ukuran Perusahaan memiliki nilai minimum sebesar 27,2 dan maksimum 35,4 dengan rata-rata 31,459 serta standar deviasi 1,7694.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 3 Hasil Uji Normalitas

Variabel	Skewness	Kurtosis	Kesimpulan
Pengungkapan Anti Korupsi	-0,636	0,155	Normal
Tingkat Kepemilikan Pemerintah	0,483	-0,814	Normal
Dewan Komisaris Independen	0,009	-0,944	Normal
Ukuran Perusahaan	0,370	-0,026	Normal

Uji normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan nilai skewness dan kurtosis. Berdasarkan kriteria Hair et al. (2014), data dapat dikatakan berdistribusi normal apabila nilai skewness berada dalam rentang -2 sampai +2, serta nilai kurtosis berada dalam rentang -7 sampai +7. Seluruh nilai skewness berada pada rentang -2 hingga +2, dan seluruh nilai kurtosis berada pada rentang -7 hingga +7. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data penelitian ini telah memenuhi asumsi normalitas.

Uji Multikolinearitas

Tabel 4 Hasil Uji Multikolinearitas

Model		Coefficients ^a	
		Collinearity Statistics	
		Toleranc e	VIF
1	Tingkat Kepemilikan Pemerintah	0,802	1,247
	Dewan Komisaris Independen	0,911	1,098
	Ukuran perusahaan	0,739	1,354

Uji multikolinearitas digunakan untuk membandingkan tingkat korelasi antar variabel independen pada model regresi. Pada pengujian multikolinearitas, digunakan nilai toleransi dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4 menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki hasil VIF lebih dari 10. Hasil perhitungan nilai *Tolerance* juga menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai tolerance kurang dari 0,10. Jadi, dapat dinyatakan tidak ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 5 Hasil Uji Heteroskedastisitas

R Square	Chi-Square Hitung	Chi-Square Tabel	Kesimpulan
0,084	13,104	14,067	Tidak terdapat heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah terjadi ketidaksamaan varians pada residual (error) dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya dalam model regresi. Penelitian ini menggunakan uji *white* sebagai alat uji asumsi heteroskedastisitas, Berdasarkan Tabel 5 karena nilai Chi-Square hitung < Chi-Square tabel, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak mengalami heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Tabel 6 Hasil Uji Autokorelasi

Nilai dU	Nilai DW	Nilai 4-dU	Kesimpulan
1,776	2.039	2,224	$dU < DW < 4-dU \rightarrow$ tidak ada autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji sejauh mana regresi linear ada korelasi kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-

1(sebelumnya). Penelitian ini menggunakan Durbin Watson dengan transformasi Cochrane Orcutt, berdasarkan tabel 6 dapat diketahui bahwa model regresi ini sudah bebas dari masalah autokorelasi.

Pengujian Hipotesis

Tabel 7 Hasil Pengujian Hipotesis

Variabel	B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Kesimpulan
(Constant)	-0,070	0,234	-	-0,297	0,767	
Tingkat Kepemilikan Pemerintah (TKP)	0,033	0,100	0,027	0,326	0,745	H1 ditolak
Dewan Komisaris Independen (DKI)	0,429	0,090	0,363	4,767	0,000	H2 diterima
Ukuran Perusahaan (UP)	0,014	0,007	0,176	2,081	0,039	H3 diterima
R Square (R²)	0,195					
F Sig.	0,000					

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada Tabel 7, diperoleh bahwa variabel Tingkat Kepemilikan Pemerintah (TKP) tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan anti korupsi (Sig. 0,745 > 0,05), sehingga H1 ditolak. Sebaliknya, Dewan Komisaris Independen (DKI) berpengaruh positif dan signifikan ($\beta = 0,429$; Sig. 0,000 < 0,05), sehingga H2 diterima. Selanjutnya, Ukuran Perusahaan (UP) juga menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan anti korupsi ($\beta = 0,014$; Sig. 0,039 < 0,05), sehingga H3 diterima. Model penelitian ini memiliki nilai R² sebesar 0,195, yang berarti variabel independen mampu menjelaskan 19,5% variasi pengungkapan anti korupsi sementara sisanya 80,5% dipengaruhi oleh variabel independen diluar penelitian ini, dengan F Sig. 0,000 yang menunjukkan model layak digunakan dan semua variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen.

Hasil Persamaan Regresi Linier Berganda :

$$PAK = -0.070 + 0.033(TKP) + 0.429(DKI) + 0.014(UP) + \epsilon$$

Pembahasan

Pengaruh Tingkat Kepemilikan Pemerintah Terhadap Pengungkapan Anti Korupsi

Hasil pengujian menunjukkan bahwa tingkat kepemilikan pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan anti korupsi ($\beta = 0,027$; Sig. = $0,745 > 0,05$). Hal ini mengindikasikan bahwa besar kecilnya kepemilikan pemerintah tidak secara langsung mendorong peningkatan pengungkapan anti korupsi, hal ini terjadi karena faktor regulasi, mekanisme pengawasan, dan tekanan stakeholder lebih dominan. Penelitian oleh Graciella et al. (2023) menemukan bahwa kepemilikan pemerintah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan informasi perusahaan karena praktik tata kelola lebih dipengaruhi oleh mekanisme pengawasan internal dan tekanan eksternal daripada komposisi kepemilikan. Dapat disimpulkan bahwa kepemilikan pemerintah bukanlah faktor utama yang menentukan luasnya pengungkapan sukarela, termasuk pengungkapan anti korupsi, karena faktor regulasi dan tekanan stakeholder lebih dominan. Temuan ini konsisten dengan penelitian Sari et al. (2021) serta Odriozola & Etxeberria (2021), namun berbeda dengan hasil penelitian Hayati et al. (2025) Widya Zulfani et al. (2024), dan Faisal et al. (2022) yang menemukan adanya pengaruh kepemilikan pemerintah terhadap pengungkapan anti korupsi.

Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap Pengungkapan Anti Korupsi

Hasil pengujian menunjukkan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan anti korupsi ($\beta = 0,363$; Sig. = $0,000$). Artinya, semakin besar proporsi komisaris independen, semakin tinggi kecenderungan perusahaan BUMN mengungkapkan program anti korupsi dalam laporan tahunan. Temuan ini menegaskan peran komisaris independen sebagai mekanisme pengawasan penting yang meningkatkan transparansi dan mencegah praktik korupsi, sejalan dengan penerapan *Good Corporate Governance* Hartomo & Hutomo (2020) Selain itu, hasil ini juga mendukung regulasi OJK No.33/POJK.04/2014 dan PER-01/MBU/2011 yang menekankan pentingnya independensi dewan komisaris di BUMN. Secara teoretis, temuan ini konsisten dengan teori legitimasi, dimana pengungkapan anti korupsi menjadi sarana BUMN menjaga akuntabilitas publik. Hasil ini sejalan dengan penelitian Al-Okaily (2024),Previtali & Cerchiello (2023), Ghazwani et al. (2024), Mazumder (2024), Hartomo & Hutomo (2020) dan Mahmud et al. (2021). Namun hasil ini bertentangan penelitian yang dilakukan oleh Ghazwani et al. (2024) Putri & Yustisi (2022), Indarto (2023) yang menemukan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan anti korupsi.

Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan Anti Korupsi

Hasil pengujian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan anti korupsi ($\beta = 0,176$; Sig. = $0,039 < 0,05$). Artinya, semakin besar ukuran perusahaan BUMN, semakin tinggi kecenderungan pengungkapan informasi anti korupsi. Temuan ini mendukung *legitimacy theory*, dimana perusahaan besar lebih terdorong menjaga reputasi dan legitimasi sosial melalui transparansi, terutama karena BUMN menjadi sorotan publik dan regulator (Hayati et al., 2025). Hasil penelitian ini konsisten dengan Yelitasari et al. (2021), Indarto (2023), Previtali & Cerchiello (2023), Mazumder (2024), Permatasari & Prastiwi (2023), serta Hartomo & Hutomo (2020), namun berbeda dengan Graciella et al. (2023), Odriozola & Etxeberria (2021), dan Sari et al. (2021) yang tidak menemukan pengaruh signifikan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh kepemilikan pemerintah, dewan komisaris independen, dan ukuran perusahaan terhadap pengungkapan antikorupsi pada BUMN yang terdaftar di BEI periode 2019–2024. Hasilnya menunjukkan bahwa kepemilikan pemerintah tidak berpengaruh, sedangkan dewan komisaris independen dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan antikorupsi. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya mencakup BUMN dan variabel independen yang terbatas, sehingga generalisasi masih perlu dilakukan dengan hati-hati. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas sampel ke perusahaan swasta maupun sektor lain serta menambahkan variabel seperti kualitas audit, proporsi gender dewan komisaris, dan ukuran dewan komisaris agar dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pengungkapan antikorupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Alijoyo, A., & Zaini, S. (2012). *Komisaris Independen: Penggerak Governansi Korporat*. FCGI & GCG Center.
- Al-Okaily, J. (2024). Family control and corporate anti corruption disclosures: the moderating effect of female directors. *Meditari Accountancy Research*, 32(2), 424–451. <https://doi.org/10.1108/MEDAR-01-2022-1573>
- Deegan, C., Rankin, M., & Tobin, J. (2002). An examination of the corporate social and environmental disclosures of BHP from 1983-1997: A test of legitimacy theory. In *Accounting, Auditing & Accountability Journal* (Vol. 15, Issue 3, pp. 312–343). <https://doi.org/10.1108/09513570210435861>
- Digdo Hartomo, O., Maria Silvia, B., & Ekonomi dan Bisnis, F. (2019). Antecedent pengungkapan kebijakan anti korupsi perusahaan di bursa efek indonesia. In *Jurnal Kajian Akuntansi* (Vol. 3, Issue 2). <http://jurnal.unswagati.ac.id/index.php/jka>
- Faisal, F., Joseph, C., Saputri, A., & Prastiwi, A. (2022). The content and determinants of CSR anti-corruption disclosure: the case of public-listed companies in Indonesia. *Journal of Financial Crime*, 29(3), 890–907. <https://doi.org/10.1108/JFC-07-2021-0155>
- Ghazwani, M., Alamir, I., Salem, R. I. A., & Sawan, N. (2024). Anti-corruption disclosure and corporate governance mechanisms: insights from FTSE 100. *International Journal of Accounting and Information Management*, 32(2), 279–307. <https://doi.org/10.1108/IJAIM-08-2023-0211>
- Ghozali, I., & Chariri, A. (2007). *Teori Akuntansi* (3rd ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Graciella, T., Meco Sutardja,), & Bambang Setiono,); (2023). Factors Influencing Anti-Corruption Disclosure In Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Sosial*, 12(2), 1–10. <https://doi.org/10.22441/jies.v12i2.24406>
- Gray, R., Owen, D., & Adams, C. (1996). *Accounting and Accountability: Changes and Challenges in Corporate Social and Environmental Reporting*. Prentice Hall.

- Hair, J., Black, W., Babin, B., & Anderson, R. (2014). *Multivariate Data Analysis*. Pearson Education Limited.
- Hartomo, O. D., & Hutomo, S. H. P. (2020). The ownership structure, board of directors, diversification, and disclosure of anti-corruption policies. *Assets: Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*, 9(2), 121. <https://doi.org/10.25273/jap.v9i2.5660>
- Hayati, L. W., Suma'a, M. I., Andini, D. P., Isra, I. M., & Zaitul, Z. (2025). Pengungkapan Anti Korupsi dari Perspektif Corporate Governance. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 5(2), 630.
- Indarto, S. L. (2023). Determinan Pengungkapan Kebijakan Anti Korupsi Ditinjau dari Good Corporate Governance dan Reputasi Auditor. *Journal of Trends Economics and Accounting Research*, 3(3), 277–286. <https://doi.org/10.47065/jtear.v3i3.581>
- Jannah, M., & Adhariani, D. (2021). *Determinants of Anti-Corruption Disclosure in State-Owned Enterprise in Indonesia*.
- Karim, N. K., Aminah, & Sasanti, E. E. (2016). Pengungkapan anti korupsi dan kinerja keuangan perusahaan: studi kasus perusahaan terdaftar di indeks sri kehati. *Jurnal Riset Akuntansi*.
- Masud, M. A. K., Hossain, M. S., Rahman, M., Chowdhury, M. A. F., & Rahman, M. M. (2024). Corruption disclosure practices of Islamic and conventional financial firms in Bangladesh: the moderating role of Big4. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 15(1), 32–55. <https://doi.org/10.1108/JIABR-07-2021-0195>
- Mazhani Mahmud, N., Salwani Mohamed, I., Arshad, R., & Author, C. (2021). Board Characteristics and Disclosure of Corporate Anti-Corruption Policies. In *management and accounting review* (Vol. 20).
- Mazumder, M. M. M. (2024). A longitudinal examination of anti-corruption disclosure in the banking sector of a least-developed economy: does board composition make a difference? *Asian Review of Accounting*. <https://doi.org/10.1108/ARA-12-2023-0351>
- Odrizola, M. A., & Etxeberria, I. Á. (2021). Determinants of corporate anti-corruption disclosure: The case of the emerging economics. *Sustainability (Switzerland)*, 13(6). <https://doi.org/10.3390/su13063462>
- Permatasari, S. Y., & Prastiwi, A. (2023). Pengaruh Karakteristik Perusahaan Dan Dewan Komisaris Terhadap Pengungkapan Anti Korupsi Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Owner*, 7(4), 3494–3509. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i4.1638>
- Previtali, P., & Cerchiello, P. (2023). Corporate governance and anti-corruption disclosure. *Corporate Governance (Bingley)*, 23(6), 1217–1232. <https://doi.org/10.1108/CG-06-2022-0275>
- Putri, D. D., & Yustisi, Y. P. (2022). Mekanisme Tata Kelola Internal dan Pengungkapan Antikorupsi Perusahaan di Indonesia. *Jurnal Ekombis Review*, 10(2), 1245–1254. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v10i2>
- Rissdiana, J., & Riduwan, A. (2023). *Pengaruh Corporate Governance Dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Pengungkapan Kebijakan Anti Korupsi*.

JURNAL.....

ISSN: xxxx-xxxx (media online)

Sari, T. K., Cahaya, F. R., & Joseph, C. (2021). Coercive Pressures and Anti-corruption Reporting: The Case of ASEAN Countries. *Journal of Business Ethics*, 171(3), 495–511. <https://doi.org/10.1007/s10551-020-04452-1>

Solomon, J. (2010). *Corporate Governance and Accountability* (3rd ed.). John & Willey Sons.

Sudana, I. M. (2011). *Manajemen Keuangan Perusahaan: Teori dan Praktik*. Erlangga.

Tyas, R. W., & Rahmawati, I. P. (2023). Pentingkah Karakteristik Perusahaan Dan Tipe Industri Pada Pengungkapan Anti Korupsi? *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 23(2), 291–308. <https://doi.org/10.25105/mraai.v23i2.14076>

Wajdi, F., Rinaldi, K., Saravishta, D. B., Halimah, L., & Fajar, A. (2024). *Ebook Pengantar Pendidikan Antikorupsi* (F. Wajdi, Ed.; 1st ed.). Widina Media Utama.

Widya Zulfani, N., Solichin, M., Bisnis dan Humaniora, F., Teknologi Yogyakarta, U., & Studi, P. S. (2024). *Pengaruh Good Corporate Governance, Tingkat Kepemilikan Pemerintah, Dan Kualitas Audit Terhadap Pengungkapan Antikorupsi Di Perusahaan Bumn Tahun 2018-2022. Vol. 5 No. 2.*